

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN GANTI RUGI

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI



Oleh:

DAMIANUS TANGGU SOLO
NPM.19810489

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

DAMIANUS TANGGU SOLO. NPM.19810489. 2023.IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui implikasi hukum ganti rugi kepada masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan filosofi fungsi sosial hak atas tanah tersebut, ditetapkan dasar pembentukan Undang-Undang Pengadaan Tanah, yakni untuk menjamin tersedianya tanah untuk penyelenggaraan pembangunan dengan mendasarkan pada penghormatan hak rakyat atas tanah. Ketentuan hukum terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Dan undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hukum tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah. Pengertian ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 7 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 adalah : Penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan tanah. Ganti kerugian merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Hak Atas Tanah khususnya Pemegang Hak Atas Tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama. Malang : Bayu Media Publishing
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika
- , 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1, Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahan*, Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- , 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana
- A.P Parlindungan, 1985, *Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Cetakan Pertama. Bandung : Alumni,
- , 1986, *Pandangan Kondisi Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Pertama. Bandung : Alumni
- , 1989, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan Pertama. Bandung : Mandar Maju
- , 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung : Mandar Maju.
- , 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No.24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Cetakan Pertama. Bandung : Mandar Maju
- , 2008, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Kesembilan. Bandung : Mandar Maju.

- Arie Sukanti Hutagalung et.al., 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Pertama. Denpasar : Pustaka Larasan
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga; Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Dewata, Mukti Fajar Nur. Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harun, Badriyah. 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Harsono, Boedi.2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang- undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka,
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Miru, Ahmadi. Pati, Sakka. 2014, *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muljadi, Kartini. Gunawan, Widjaja. 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marsoem, Sudjarwo, Wahyono Adi, Pieter G. Manoppo. (2015). *Panduan Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah: Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia*. ReneBook, Jakarta Selatan.
- Muliawan, Jarot Widya. (2016). *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Salle, Aminuddin. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Medika, Jakarta Selatan.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sudjito dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan Tanah, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi*, Tugujogja Pustaka. Yogyakarta

- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Prasetyo, Teguh. 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Prodjodikoro, Wirjobno. 2018, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Soekanto, Soejono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soimin, Soedharyo. 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta